



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**LAPORAN KEUANGAN
OPD
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

dispermadesppkb.bna@gmail.com



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.



Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrua, atau (2) Basis Kas Menuju Akrua. Basis Kas Menuju Akrua boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrua wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara baru mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banjarnegara, 31 Januari 2023


KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

HENDRO SAHYONO, SE. MSI
Pembina Tk. I
NIP. 196811301997031007



DAFTAR ISI

URAIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....

LAPORAN KEUANGAN.....

A LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....

B LAPORAN OPERASIONAL

C LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D NERACA.....

E CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....

I PENDAHULUAN

II KEBIJAKAN AKUNTANSI

III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

LAMPIRAN :

I LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

1. Laporan Realisasi Anggaran :

- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (SIMDA)
- Buku Panjar
- SPJ Pengeluaran (Bulan Desember 2021; Jenis Laporan Fungsional-SIMDA)
- SPJ Pendapatan (Bulan Desember; jenis laporan fungsional – SIMDA)
- Fotocopy STS pengembalian belanja (UP, TU, LS)
- Fotocopy Surat Setor Pajak (SSP) atas pajak yang disetorkan ke Kas Negara Tahun 2021
- Daftar Pendapatan yang tidak mencapai target/melebihi target beserta penjelasannya
- Daftar Kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang anggarannya tidak terserap secara signifikan beserta penjelasannya.



2. Laporan Operasional

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

- Neraca Manual dan Neraca SIMDA
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Salinan Rekening Koran Bank Per 31 Desember 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Per 31 Desember 2021
- Format manual beserta penjelasannya (Form 1 s/d 13)
- Berita Acara Serah Terima Aset Tetap (Mutasi)
- Berita Acara Penilaian Aset Tetap
- Berita Acara/Keputusan Penghapusan Aset
- Dokumen lain terkait Neraca SKPD

II PERNYATAAN TELAH REKONSILIASI SALDO ASET TETAP MENURUT AKUNTANSI DENGAN PENGURUS BARANG

III PERNYATAAN KESESUAIAN ANTARA CATATAN DAN FISIK ASET TETAP (KUANTITAS DAN SPESIFIKASI)

IV LAPORAN BARANG MILIK DAERAH

- Kartu Inventaris Barang A Tanah
- Kartu Inventaris Barang B Peralatan dan Mesin
- Kartu Inventaris Barang C Gedung dan Bangunan
- Kartu Inventaris Barang D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Kartu Inventaris Barang E Aset tetap Lainnya
- Kartu Inventaris Barang F Konstruksi Dalam Pengerjaan

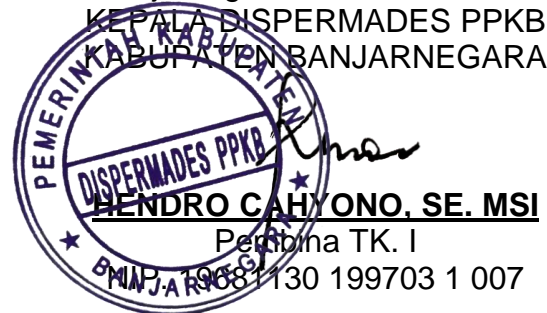


**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA**

Laporan Keuangan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Banjarnegara, 31 Januari 2023
KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA





LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2022		TA 2021
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
Belanja	22.523.948.490	21.372.323.260	16.826.252.606
Belanja Operasi	20.126.267.490	19.019.379.960	16.183.036.206
Belanja Modal	2.397.681.000	2.352.943.300	643.216.400
Surplus/Defisit	22.523.948.490	21.372.323.260	16.826.252.606

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Ringkasan Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO 2022
PENDAPATAN – LO	2.090.452.990,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0,00



LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		2.090.452.990,00
	Pendapatan Hibah – LO	2.090.452.990,00
	Dana Darurat - LO	0,00
BEBAN		20.979.370.658,00
BEBAN OPERASI		19.968.546.592,00
	Beban Pegawai	4.560.212.239,00
	Beban Persediaan	2.310.028.426,00
	Beban Jasa	8.665.499.556,00
	Beban Pemeliharaan	104.801.000,00
	Beban Perjalanan Dinas	3.799.128.480,00
	Beban Hibah	528.876.891,00
	Beban Bantuan Sosial	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	0,00
	Beban Lain-lain	0,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	818.148.614,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	192.512.952,00
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.500,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
	Beban Bagi Hasil	0,00
	Beban Bantuan Keuangan	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(18.888.917.668,00)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- Koreksi kesalahan mengenai perhitungan aset lancar dan non lancar.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas, disajikan sebagai berikut :



EKUITAS AWAL	12.427.957.520,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.888.917.668,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(1.520.946.336,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	21.372.323.260,00
EKUITAS AKHIR	13.390.416.776,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 (*restatement*) dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bank	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	550.979.051,00	601.097.971,00
JUMLAH ASET LANCAR	550.979.051,00	601.097.971,00
ASET TETAP		
Tanah	2.916.542.680,00	2.916.542.680,00
Peralatan dan Mesin	10.076.217.251,00	9.258.694.836,00
Gedung dan Bangunan	9.796.667.350,00	9.582.267.350,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.500.000,00	6.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	16.610.000,00	14.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.856.606.995,00)	(9.846.773.671,00)
JUMLAH ASET TETAP	12.955.930.286,00	11.931.881.195,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00



	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00	5.600.000,00
	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(5.600.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	13.506.909.337,00	12.532.979.166,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Utang Bunga	0,00	0,00
	Utang Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	Utang Belanja	116.492.561,00	105.021.646,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	116.492.561,00	105.021.646,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	116.492.561,00	105.021.646,00
EKUITAS			
	EKUITAS	13.390.416.776,00	12.427.957.520,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13.506.909.337,00	12.532.979.166,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD). Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas pendapatan dan aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari RKUD.



I. PENDAHULUAN

Dasar

A. DASAR HUKUM

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 6);

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

<i>Entitas akuntansi</i>	Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara,
<i>Basis Akuntansi</i>	Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Bendahara Penerimaan atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Penyajian Pendapatan dan Beban dalam Laporan Operasional, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan pendapatan dan timbulnya kewajiban dan beban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Penerimaan/ Bendahara Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah



ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Aset

1. Aset

Adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi



kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang



dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah. PMD pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset tetap

c. Aset tetap



Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2022 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pada Tahun Anggaran 2022, terhadap seluruh aset tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan penyusutan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali :

1. Tanah;
2. Barang Bercorak Seni Budaya
3. Hewan Ternak dan Tanaman
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan
5. Buku dan Perpustakaan

Sehubungan dengan mulai diterapkannya basis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD yang akan dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, Pada Tahun 2022 dilakukan perhitungan kembali akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022, sesuai dengan peraturan yang diterapkan mengenai



penyusutan aset tetap. Perhitungan kembali atas akumulasi aset tetap dimaksud dituangkan dalam neraca *restatement*.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan



dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Pada Tahun 2022 juga dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lain-lain yang berupa aset tidak berwujud dan aset rusak, dan hasil perhitungan dituangkan dalam neraca *restatement*.

Kewajiban

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang



Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Pendapatan diterima di Muka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

*Pendapatan
– LRA*

4. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:



- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja - LRA

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.



Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Transfer

6. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah

Pembiayaan

7. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan- LO

8. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya



ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

Beban

9. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. 1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan DISPERMADESPPKB Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran, Realisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 21.372.323.260,00 atau 94,89% dari total anggaran. Realisasi pendapatan, belanja pada Tahun 2022, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	0,00	0,00	00,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
BELANJA	22.523.948.490	21.372.323.260	94,89	16.826.252.606
Belanja Operasi	20.126.267.490	19.019.379.960	94,50	16.183.036.206
Belanja Modal	2.397.681.000	2.352.943.300	98,13	643.216.400
SURPLUS/ DEFISIT	(22.523.948.490)	(21.372.323.260)	94,89	(16.826.252.606)

A. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	00,00	0,00



Realisasi **1. Pendapatan Asli Daerah**

*Pendapatan
Asli Daerah*

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Banjarnegara. Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2022</i>			<i>Tahun 2021</i>
	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi</i>
Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	00,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	00,00	0,00

Realisasi **1.1. Hasil Pajak Daerah**

*Penerimaan
Hasil Pajak
Daerah*

Realisasi penerimaan hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00. yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2022</i>			<i>Tahun 2021</i>
	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi</i>
Pajak Hotel	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Reklame	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00
Pajak BPHTB	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00



Realisasi **1.2. Hasil Retribusi Daerah**

Penerimaan Hasil Retribusi Daerah Realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2022</i>			<i>Th 2021</i>
	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi</i>
Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0	0,00
Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0	0,00
Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00

Realisasi **1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2022</i>			<i>Tahun 2021</i>
	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi</i>
BPR/BKK	0,00	0,00	0	0,00
PDAM	0,00	0,00	0	0,00
Perusda Percetakan	0,00	0,00	0	0,00
PT. Bank Jateng	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00

Realisasi **1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran yang direncanakan dalam DPA sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Tahun 2022</i>			<i>Tahun 2021</i>
	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi</i>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0	0,00
Pendapatan Jasa Giro	0,00	0,00	0	0,00
Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0	0,00
Tuntutan ganti Rugi	0,00	0,00	0	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0	0,00



Belanja

B. BELANJA

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.21.372.323.260,00 atau 94,89% dari anggaran sebesar Rp.22.523.948.490,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	20.126.267.490	19.019.379.960	94,50	16.183.036.206
Belanja Modal	2.397.681.000	2.352.943.300	98,13	643.216.400
JUMLAH	22.523.948.490	21.372.323.260	94,89	16.826.252.606

Belanja

1. Belanja Operasi

Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp.19.019.379.960,00 atau 94.50% dari anggaran sebesar Rp.20.126.267.490,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	4.586.602.250	4.550.061.732	99,20	4.228.001.017,00
Belanja Barang dan Jasa	15.509.665.240	14.439.318.228	93,10	11.935.167.189,00
Belanja Hibah	30.000.000	30.000.000	100,00	643.826.400,00
JUMLAH	20.126.267.490	19.019.379.960	94,50	16.183.036.206,00

Belanja

1.1. Belanja Pegawai

Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4.550.061.732,00 atau 99,20% dari anggaran sebesar Rp 4.586.602.250,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:



(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.907.350.528	2.886.878.399	93,30	2.918.923.209,00
Tambahan Penghasilan ASN	1.507.971.722	1.492.153.333	98,95	1.108,857.808,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.280.000	171.030.000	99,85	200.220.000,00
JUMLAH	4.586.602.250	4.550.061.732	99,20	4.228.001.017,00

Belanja

Barang dan

Jasa

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2022 sebesar Rp 14.439.318.228,00 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp 15.509.665.240,00, dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Aggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	1.906.643.800	1.871.209.600	98,14	2.632.685.603
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	355.000
Belanja Jasa Kantor	5.295.903.800	5.194.900.290	98,09	3.953.729.806
Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.329.110.440	3.248.923.658	97,59	3.230.386.388
Belanja Sewa Peralatan dan mesin	17.806.200	17.806.200	100	4.900.000
Belanja Sewa Gedung dan bangunan	27.368.000	27.368.000	100	5.272.300
Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	99.634.000	96.681.000	97,04	0,00
Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	38.016.000



Konsultasi Non Kontruksi				
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.290.000	99.265.000	99,97	142.046.200
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.536.000	5.536.000	100	18.500.000
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.649.873.000	3.799.128.480	81,70	1.886.825.892
Belanja Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	78.500.000	78.500.000	100	22.450.000
JUMLAH	15.509.665.240	14.439.318.228	93,10	11.935.167.189

Belanja Hibah

1.3. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 30.000.000,00, dirinci sebagai berikut:



(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	19.868.000,00
JUMLAH	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	19.868.000,00

Belanja
Modal

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.352.943.300,00 atau 98,13% dari anggaran sebesar Rp. 2.397.681.000,00 dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Belanja Modal	Tahun 2022			Th 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.088.593.000	2.045.525.300	97,94	643.216.400
Bangunan dan Gedung	216.000.000	214.400.000	99,26	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset tetap Lainnya	93.088.000	93.018.000	99,92	0,00
JUMLAH	2.397.681.000	2.352.943.300	98,13	643.216.400

Surplus/(Defisit)

3. Surplus/(Defisit)

Surplus (Defisit) adalah merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebesar (Rp. 21.372.323.260) atau mencapai 94,89% persen dari yang dianggarkan surplus/(defisit) sebesar (Rp. 22.523.948.490,00)

Catatan
Penting
Lainnya

E. CATATAN PENTING LAINNYA

Informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp 2.090.452.990,00 dan Beban yang disajikan sebesar Rp 20.979.370.658,00, sehingga terdapat surplus/defisit sebesar (Rp 18.888.917.668,00) Realisasi pendapatan, dan beban secara rinci Tahun 2022, sebagai berikut:

(dalam satuan rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
PENDAPATAN – LO	2.090.452.990,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	2.090.452.990,00
BEBAN	20.979.370.658,00
Beban Operasi	20.979.370.658,00
Beban Transfer	0,00
Defisit Non Operasional	0,00
Beban Luar Biasa	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(18.888.917.668,00)

B. 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

B.2.1 PENDAPATAN – LO

B.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan asli daerah LO merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah Kabupaten Banjarnegara. Realisasi pendapatan asli daerah LO Tahun 2022, merupakan pendapatan asli daerah yang sudah menjadi hak pemerintah daerah walaupun belum seluruhnya diterima di RKUD/Bendahara Penerimaan .

Pendapatan Asli Daerah – LO terealisasi Rp 2.090.452.990,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Pendapatan Pajak Daerah- LO	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	2.090.452.990,00
JUMLAH	2.090.452.990,00



B.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah- LO

Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah- LO tahun 2022 sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2022
1	Pajak Hotel	0,00
2	Pajak Restoran	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00
4	Pajak Reklame	0,00
	JUMLAH	0,00

B.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Realisasi penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah- LO tahun 2022 sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 2022
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	0,00
Pelayanan Parkiran di Tepi Jalan Umum – LO	0,00
Pelayanan Pasar – LO	0,00
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO tahun 2022 sebesar Rp0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 2022
BPR/BKK	0,00
PDAM	0,00
Perusda Percetakan	0,00
PT. Bank Jateng	0,00
JUMLAH	0,00



B.2.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00
Hasil Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00
Jasa Giro –LO	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir –LO	0,00
Pendapatan Hibah – LO	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.2. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp. 2.090.452.990,00 yang merupakan pendapatan atas hibah dari Pemerintah Pusat.

B.2.3. BEBAN

Realisasi Beban tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 20.979.370.658,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
1	Beban Operasi	20.979.370.658,00
2	Beban Transfer	0,00
3	Beban Non Operasional	0,00
4	Belanja Luar Biasa	0,00
	JUMLAH	20.979.370.658,00

B 2.3.1. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Tahun 2022 sebesar Rp 17.187.923.149,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Pegawai	4.560.212.239,00
Beban Barang dan Jasa	14.879.457.462,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	0,00



Beban Hibah	528.876.891,00
Beban Bantuan Sosial	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00
Beban Lain-lain	0,00
Beban Penyutatan dan Amortisasi	1.010.824.066,00
JUMLAH	20.979.370.658,00

B.2.3.1.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp 4.560.212.239,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.438.092,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.498.744.147,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.030.000,00
JUMLAH	4.560.212.239,00

B.2.3.1.2 .Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 14.879.457.462,00, dengan perincian, sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

<i>Nama</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Barang Pakai Habis	2.310.028.426,00
Beban Barang Tak Habis pakai	355.000,00
Beban Jasa Kantor	5.196.220.698,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.248.923.658,00
Beban Sewa Tanah	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	17.806.200,00
Beban Sewa Gedung dan bangunan	27.368.000,00
Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	96.681.000,00
Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	38.016.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN	0,00
Beban Jasa Insentif Bagi Pagawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.265.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.536.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.799.128.480,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00
JUMLAH	14.879.457.462,00



B.2.3.1.3 Beban Bunga

Realisasi Beban Bunga Tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2021</i>
Beban Bunga Utang Pinjaman	0,00
Beban Bunga Utang Obligasi	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.4. Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi Tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2021</i>
Beban Subsidi	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.5. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 528.876.891,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	735.800,00
Beban Hibah barang kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan	237.443.766,00
Beban Hibah uang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	30.000.000,00
Beban Hibah barang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	260.697.325,00
JUMLAH	528.876.891,00

B.2.3.1.6. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2021</i>
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00
Bantuan keuangan lainnya	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.010.824.066,00, dengan perincian, sebagai berikut:



B.2.3.1.7.1. Beban Penyusutan Mesin dan Peralatan

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0,00
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	34.998.575,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	337.416.823,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	0,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	22.249.560,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	54.282.000,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.096.600,00
Beban Penyusutan Alat Studio	59.928.004,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	36.919.680,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	0,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	0,00
Beban Penyusutan Unit Laboratorium Nuklir	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	0,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	0,00
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0,00
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00
Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	222.175.100,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	21.660.872,00
Beban Penyusutan Alat Deteksi	6.421.400,00
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika	0,00
Beban Penyusutan Sumur	0,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung	0,00
Beban Penyusutan Alat SAR	0,00
Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalau Lintas Darat	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00
JUMLAH	818.148.614,00

B.2.3.1.7.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	192.512.952,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00
Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu/Tanda Batas	0,00
JUMLAH	192.512.952,00



B.2.3.1.7.3. Beban Penyusutan Jalan , Irigasi dan Jaringan

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Penyusutan Jalan	0,00
Beban Penyusutan Jembatan	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pengaman	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sumber Air dan Air Tanah	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	106.250,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gas	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	56.250,00
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	0,00
JUMLAH	162.500,00

B.2.3.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.7. 5. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak)	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.7. 5. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
JUMLAH	0,00

B.2.3.1.8. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00, dengan rincian, sebagai berikut:

B.2.3.1.8.1 Beban Penyisihan Piutang

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Penyisihan Piutang Restoran	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00
JUMLAH	0,00



B.2.3.1.9 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00, dengan perincian, sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Saldo 2022</i>
Beban Lain-lain	0,00
JUMLAH	0,00

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL	12.427.957.520,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.888.917.668,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(1.520.946.336,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	21.372.323.260,00
EKUITAS AKHIR	13.390.416.776,00

Sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2022, Ekuitas Awal OPD Tahun 2022 sebesar Rp 12.427.957.520,00 Surplus/defisit LO adalah (Rp.18.888.917.668,00) sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar (Rp 1.520.946.336,00), serta Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp 21.372.323.260,00 sehingga Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2022 adalah Rp 13.390.416.776,00



D. NERACA

1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2022 dengan komposisi sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Th 2022	Th 2021
		Jumlah	Jumlah
1	Aset	13.506.909.337,00	12.532.979.166,00
2	Akumulasi Penyusutan	(9.856.606.995,00)	(9.846.773.671,00)
2	Kewajiban	116.492.561,00	105.021.646,00
4	Ekuitas	13.390.416.776,00	12.427.957.520,00

2. PENJELASAN PER POS NERACA

2.1. Aset Lancar

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp.0,00**

Nilai ini merupakan saldo kas Per 31 Desember 2022 yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara terdiri atas sisa belanja Tahun Anggaran 2022 yang baru disetorkan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan hutang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp0,00

Sisa belanja merupakan sisa dana atas pencairan SP2D, TU maupun GU yang tidak dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran/PPTK Tahun Anggaran 2022 dan baru disetorkan pada Tahun 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Honor Tahun 2022 yang belum dibayarkan kepada	0,00
Gaji Bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan kepada	0,00
JUMLAH	0,00



Kas di

2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,00

*Bendahara
Penerima*

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang merupakan pendapatan daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih di tangan Bendahara Penerimaan dan baru disetor/ditransfer ke Kas Daerah pada Bulan Januari 2023

Piutang Pajak

2.1.3 Piutang Pajak sebesar Rp0,00

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 , yang terdiri dari :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31/12/2021	3112/2020
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00
Pajak Reklame	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Piutang

Retribusi

2.1.4 Piutang Retribusi sebesar Rp.0,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31/12/2022	31/12/2021
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan –RSUD	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	0,00	0,00
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00
Retribusi Ijin Gangguan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00



Piutang Lain-
Lain

2.1.5 Piutang Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp0,00

Piutang Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian laba/deviden Tahun 2022 yang belum diterima pemda pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31/12/2022	31/12/2021
PD BPR/BKK Mandiraja	0,00	0,00
PD BKK Banjarnegara	0,00	0,00
Perusda Percetakan	0,00	0,00
Perusda Air Minum	0,00	0,00
Perusda Pertambangan	0,00	0,00
PT Bank Jateng	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

2.1.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang atas pendapatan Lain-lain PAD yang sah yang belum diterima pemda pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31/12/2022	31/12/2021
Fasos dan Fasum	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

2.1.7. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain merupakan Piutang selain di jenis piutang atas, yang belum diterima pemda pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31/12/2022	31/12/2021
Jumlah	0,00	0,00



Beban Asuransi **2.1.8 Beban Asuransi Dibayar Di Muka Rp.0,00**
Dibayar Di Muka

Asuransi Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan nilai premi asuransi yang masih menjadi *prepaid* per 31 Desember 2022, premi dibayarkan Tahun 2022, tetapi pertanggungannya sampai dengan Tahun 2022.

Persediaan **2.1.9 Persediaan sebesar Rp 550.979.051,00**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 550.979.051,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam satuan Rupiah)

Uraian Persediaan	31/12/2022	31/12/2021
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor	600.000	1.367.100
Kertas dan Cover	165.000	0,00
Bahan Cetak	0,00	0,00
Benda Pos	0,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	0,00
Perabot Kantor	467.200	0,00
Alat Listrik	0,00	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	0,00	0,00
Obat	0,00	599.721.871
Obat-obatan Lainnya	549.746.851	0,00
Jumlah	550.979.051	601.097.971

Rincian lebih lanjut lihat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada lampiran.



Aset tetap

2.2. Aset tetap sebesar Rp. 22.812.537.281,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 22.812.537.281. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa (BOP), Mutasi Masuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hibah Masuk dari Non SKPD, Reclass Masuk, dan Koreksi Tambah. Sedangkan pengurangan Aset tetap bersumber dari Mutasi Keluar ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hibah keluar ke non SKPD, Reclass Keluar, Koreksi Kurang, Penghapusan, dan Nilai aset di bawah minimal kapitalisasi.

Aset tetap di Neraca disajikan secara historis yaitu sebesar harga perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:



(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	2.916.542.680	0,00	0,00	2.916.542.680
Peralatan dan Mesin	9.258.694.836	2.290.239.225	1.472.716.810	10.076.217.251
Gedung dan Bangunan	9.582.267.350	214.400.000	0,00	9.796.667.350
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.500.000	0,00	0,00	6.500.000
Aset tetap Lainnya	14.650.000	10.705.370	8.745.370	16.610.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.778.654.866	2.515.344.595	1.481.462.180	22.812.537.281

Perubahan aset tetap selama tahun 2022 sebesar Rp1.033.882.415 yaitu saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar, Rp 22.812.537.281 dikurangi saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 21.778.654.866 atau mutasi penambahan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp 2.515.344.595 dikurangi dengan mutasi pengurangan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp 1.481.462.180

Rincian Aset tetap berdasarkan Kartu Inventaris Barang dilaporkan dalam **Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara** pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara **Tahun 2022** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Tanah

2.2.1 Tanah sebesar Rp. 2.916.542.680,00

Saldo tanah per 31 Desember 2022 sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m² dengan nilai sebesar Rp 2.916.542.680,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m² dengan nilai sebesar Rp 2.916.542.680, sehingga terdapat kenaikan/penurunan dengan nilai sebesar



Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi penambahan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Reclass keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Tanah per 31 Desember 2022 sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m² dengan nilai sebesar Rp 2.916.542.680,00 tersebut telah bersertifikat sebanyak 7 bidang, luas 3.072 m², dengan nilai Rp 2.916.542.680,00, sedangkan sisanya sebanyak 0 bidang, luas 0 m² dengan nilai Rp0,00 belum bersertifikat.

*Peralatan dan
Mesin*

2.2.2 Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 10.076.217.251,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebanyak 1.625 unit dengan nilai sebesar Rp 10.076.217.251,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebanyak 1.445 unit dengan nilai sebesar Rp 9.258.694.836,00, sehingga terdapat kenaikan sebanyak 180 unit dengan nilai kenaikan sebesar Rp. 1.033.882.415,00.

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 10.076.217.251,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo peralatan dan mesin yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebanyak 1.625 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp 10.076.217.251,00 dapat diuraikan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN
DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022

Alat	Saldo 31/12/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Alat Besar	117.990.000	127.000.000	0,00	244.990.000
Alt. Angkutan	4.680.806.439	1.259.529.500	967.519.210	4.972.816.729
Alat Bengkel & Alt. Ukur	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor & Rmh Tangga	1.627.585.711	548.354.725	224.904.850	1.951.035.586
Alt. Studio & Komunikasi	893.618.150	25.250.000	7.968.750	910.899.400
Alat Kedokteran & kesehatan	230.119.920	0,00	0,00	230.119.920
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
Komputer	1.696.819.616	234.284.000	208.610.000	1.722.493.616
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	95.821.000	63.714.000	32.107.000
Peraltan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pelindung Lainnya	4.955.000	0,00	0,00	4.955.000
JUMLAH	9.258.694.836	2.290.239.225	1.472.716.810	10.076.217.251

Mutasi penambahan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal		2.045.525.300
• Belanja Non Belanja Modal		0,00
• Mutasi masuk dari SKPD		9.955.000
• Hibah masuk dari non SKPD		4.501.125
• Reklas masuk		230.257.800
• Koreksi tambah		0,00
Jumlah		2.290.239.225



Mutasi pengurangan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	50.545.000
• Hibah Keluar		161.206.125
• Reclass keluar	0	1.260.965.685
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
• Nilai di bawah min kapitalisasi	0	0,00
Jumlah	0	1.472.716.810

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebanyak 1.625 unit dengan nilai sebesar Rp 10.076.217.251,00 tersebut meliputi :

URAIAN	UNIT	NILAI
Alat Besar	11	244.990.000
Alt. Angkutan	119	4.972.816.729
Alat Bengkel & Alt. Ukur	1	6.800.000,00
Alat Pertanian		0,00
Alat Kantor & Rmh Tangga	1.114	1.951.035.586
Alt. Studio & Komunikasi	134	910.899.400
Alat Kedokteran & kesehatan	42	230.119.920
Alat Laboratorium		0,00
Komputer	202	1.722.493.616
Alat Eksplorasi		0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		0,00
Alat Keselamatan Kerja		32.107.000
Peraltan Proses/Produksi		0,00
Rambu-rambu		0,00
Peralatan Olahraga		0,00
Alat Pelindung lainnya	1	4.955.000
JUMLAH	1.625	10.076.217.251

Sedangkan nilai buku Mesin dan Peralatan Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2022		10.076.217.251
2. Penyusutan Tahun 2022	(818.148.614,00)	
3. Akumulasi Peny. s/d tahun lalu	(7.100.773.438,00)	
4. Akumulasi Peny. s/d tahun ini		(7.918.922.052)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2022		1.157.295.199

*Gedung dan
Bangunan*

2.2.3 Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 9.796.667.350,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebanyak 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 9.796.667.350,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebanyak 41 unit dengan nilai sebesar Rp. 9,582,267,350,00. sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp 214.400.000 ,00 Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 9.796.667.350,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo gedung dan bangunan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebanyak 43 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp . 9.796.667.350,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Alat	Saldo 31/12/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Bangunan Gedung	9,582,267,350	214.400.000	0,00	9,796,667,350
Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	9,582,267,350	214.400.000	0,00	9,796,667,350

Mutasi Penambahan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	2	214.400.000,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Reclass Masuk	0	0,00
Jumlah	0	214.400.000,00



Mutasi pengurangan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Reclass Keluar	0	0,00
• Koreksi Kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebanyak 43 unit dengan nilai sebesar Rp. 9.796.667.350,00 tersebut meliputi :

URAIAN	UNIT	NILAI
Bangunan Gedung	43	9.796.667.350,00
Monumen	0	0,00
Bangunan Menara	0	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00
JUMLAH	0	9.796.667.350,00

Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	9.796.667.350
2. Penyusutan Tahun 2022	(192.512.952,00)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(1.742.334.491 ,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(1.934.847.443)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2022	7,861,819,907

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan*

2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 6.500.000,00

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp 6.500.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebanyak 3 dengan nilai sebesar Rp 6.500.000,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp 0,00. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 6.500.000,00 tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi



dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Jalan dan jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan air/irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	4.250.000	0,00	0,00	4.250.000
Jaringan	2.250.000	0,00	0,00	2.250.000
JUMLAH	6.500.000	0,00	0,00	6.500.000

Mutasi penambahan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi Masuk	0	0,00
• Reclass masuk dari SKPD	0	0,00
• Hibah masuk dari non SKPD	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Mutasi pengurangan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Reclass keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	0,00

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebanyak 3 unit dengan nilai Rp. 6.500.000,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Jalan dan jembatan	0	0,00
2.	Bangunan air/irigasi	0	0,00
3.	Instalasi	2	4.250.000
4.	Jaringan	1	2.250.000
	Jumlah	3	6.500.000



Sedangkan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	6.500.000,00
2. Penyusutan Tahun 2022	(162.500,00)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(2.675.000,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(2.837.500,00)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2021	3.662.500,00

Aset tetap **2.2.5 Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 16.610.000,00**

Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebanyak 41 unit dengan nilai sebesar Rp 16.610.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 14.650.000,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan. Sebesar Rp 1.960.000,00.

Saldo aset tetap lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 adalah 41 unit dengan nilai sebesar Rp 16.610.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Buku perustakaan	0,00	10.705.370	8.745.370	1.960.000,00
Barang bercorak kesenian	14.650.000	0,00	0,00	14.650.000
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.650.000	10.705.370	8.745.370	16.610.000



Mutasi penambahan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Belanja Modal	0	0,00
• Belanja Non Belanja Modal	0	0,00
• Mutasi Masuk	0	0,00
• Hibah masuk	40	10.705.370
• Reclas Masuk	0	0,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	10.705.370

Mutasi pengurangan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	6.473.200
• Koreksi kurang	0	2.272.170
• Penghapusan	0	0,00
Jumlah	0	8.745.370

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebanyak 41 unit dengan nilai Rp 16.610.000,00 tersebut meliputi :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Buku perpustakaan	40	1.960.000
2.	Barang bercorak kesenian	1	14.650.000
3.	Biota Perairan	0	0,00
4.	Tanaman	0	0,00
	Jumlah	0	16.650.000

Sedangkan nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	16.610.000
2. Penyusutan Tahun 2021	(0,00)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(0,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(0,00)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2021	16.610.000

Aset Tetap Lainnya yang disusutkan adalah hanya Buku dan Perpustakaan, Aset Barang Bercorak Seni dan Aset Hewan Ternak dan Tanaman tidak disusutkan.



*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.,00, sehingga tidak terdapat penurunan.

Aset Lainnya

2.3. Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.600.000,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 5.600.000,00.

Saldo aset lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	1.036.307.885	1.036.307.885	0,00
Aset Tak Berujud	5.600.000,00	93.018.000	98.618.000	0,00
Jumlah	5.600.000,00	1.129.325.885	1.134.925.885	0,00

*Tuntutan
Perbendaharaan
/Tuntutan Ganti
Rugi*

2.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 0,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan (TP/TGR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan.

Saldo tagihan TP/TGR yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2020	Mutasi Tahun 2021		Saldo 31/12/2021
		Tambah	Kurang	
	jumlah			



Mutasi penambahan tahun 2022 merupakan TP/TGR berdasarkan Surat Keputusan TP/TGR yang diterbitkan di tahun 2022 yang angsurannya akan jatuh tempo mulai tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.		
2.		
	Jumlah	NIHIL

Sedangkan mutasi kurang tahun 2022 merupakan saldo TP/TGR tahun 2022 dan tahun – tahun sebelumnya yang angsurannya jatuh tempo di tahun 2022 dan penerimaan di tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.		
2.		
	Jumlah	NIHIL

*Aset Lain-lain
(Rusak)*

2.3.2. Aset Lain-lain (Rusak) sebesar Rp.0,00

Saldo Aset Lain-lain (Rusak) per 31 Desember 2022 sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan.

Nilai Aset Lain-lain (Rusak) sebesar Rp0,00

tersebut merupakan nilai historis/perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Aset Lain-lain (Rusak) yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	1.036.307.885	1.036.307.885	0,00
Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, BA dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00



Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Mutasi penambahan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Hibah Masuk	0	0,00
• Reclas Masuk	0	1.036.307.885,00
• Koreksi tambah	0	0,00
Jumlah	0	1.036.307.885,00

Mutasi pengurangan tahun 2022 tersebut meliputi:

Uraian	Unit	Jumlah (Rp)
• Mutasi keluar ke SKPD	0	0,00
• Hibah keluar ke non SKPD	0	0,00
• Reclas keluar	0	0,00
• Koreksi kurang	0	0,00
• Penghapusan	0	1.036.307.885,00
Jumlah	0	1.036.307.885,00

Aset Lain-lain (Rusak) per 31 desember 2022 sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,00 tersebut meliputi:

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Tanah	0	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	0	0,00
3.	Bangunan Gedung	0	0,00
4.	Jalan, BA dan Jaringan	0	0,00
5.	Aset tetap Lainnya	0	0,00
	Jumlah	0	0,00

Sedangkan nilai Aset Lain-lain (Rusak) Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2022	0,00
2. Penyusutan Tahun 2022	(0,00)
3. Akumulasi Penyusutan s/d tahun lalu	(0,00)
4. Akumulasi Penyusutan s/d tahun ini	(0,00)
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0,00



Aset Tak
Berwujud

2.3.3 Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 0,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.600.000,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan, sebesar Rp5.600.000,00.

Saldo Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2022	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Software	5.600.000,00	0.00	5.600.000	0,00
Jumlah	5.600.000,00	0.00	5.600.000	0,00

Mutasi penambahan tahun 2022 merupakan aset tak berwujud yang diperoleh di tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1		
2		
	Jumlah	

Sedangkan mutasi kurang tahun 2022 merupakan aset tetap tak berwujud yang dihapuskan habis masa manfaatnya di tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Reclas Keluar	5.600.000
2.		
	Jumlah	5.600.000

Sedangkan nilai Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Per 31 Des 2022		0,00
2. Amortisasi Tahun 2022	(0,00)	
3. Akumulasi Amortisasi s/d tahun lalu	(0,00)	
4. Akumulasi Amortisasi s/d tahun ini		0,00
5. Nilai Buku Per 31 Desember 2012		0,00



Kewajiban

2.4. KEWAJIBAN

2.4.1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 116.492.561,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp 116.492.561,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 105.021.646,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 11.470.915,00. Kenaikan/Penurunan Kewajiban Jangka Pendek tersebut disebabkan semakin tertibnya administrasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp 116.492.561,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 01/01/2021	Mutasi Tahun 2022		Saldo 31/12/2022
		Tambah	Kurang	
Utang Beban	105.021.646	11.470.915	0,00	116.492.561
Utang PFK	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan diterima di Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	105.021.646	11.470.915	0,00	116.492.561

Utang Beban
Rp

2.4.1.1 Utang Beban sebesar Rp. 116.492.561,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 116.492.561,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 105.021.646,00 sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 11.470.915,00

Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban Gaji	8.050.367,00
2.	Utang Beban Tamsil ASN	102.819.974,00
3.	Utang Beban Listrik	2.270.769,00
4.	Utang Beban Telepon	105.971,00
5.	Utang Beban Air	41.000,00
6.	Utang Beban Internet	2.304.480,00
7.	Utang Beban Tamsil PTT	900.000,00
	Jumlah	116.492.561,00



2.4.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0,00

Saldo utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan.

Saldo tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.		0,00
2.		0,00
	Jumlah	0,00

*Pendapatan
diterima di Muka*

2.4.1.3. Pendapatan diterima di Muka Rp. 0,00

Saldo Pendapatan diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, sehingga terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00

Rincian pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2022, sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pajak Reklame Papan/Billboard / Videotron/Megatron - LO	0,00
2.	Pajak Reklame Kain – LO	0,00
3.	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	0,00
4.	Pajak Reklame Selebaran - LO	0,00
5.	Pajak Reklame Berjalan – LO	0,00
	Jumlah	0,00

Ekuitas

2.5. EKUITAS

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.13.390.416.776,00

*Catatan Penting
Lainnya*

2.6. CATATAN PENTING LAINNYA

Di samping informasi utama tersebut di atas, beberapa hal penting yang perlu diinformasikan dalam menjalankan



pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

a. Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi tersebut batas minimal aset yang disajikan dalam neraca adalah:

- Untuk kelompok peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp 500.000,00
- Untuk Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp 10.000.000,00.

Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*extracomptable*) dari aset yang disajikan dalam neraca. Sampai dengan tahun pelaporan 2022 berjumlah sebesar Rp.582.933.380,00

b. Kegiatan yang dibiayai dari dana bukan APBD Kabupaten Banjarnegara

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapat dukungan dana dari APBN, LOAN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi penggunaan dana yang berasal dari APBN untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan (TP) dan Dekonsentrasi (Dekon) yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	0	0	0



2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)			
	Jumlah			

Realisasi penggunaan dana LOAN/*Block Grant* yang berasal dari luar negeri yang dikelola oleh SKPD dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	0	0	0
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	0	0	0
	Jumlah	NIHIL	0	0

Dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang dikelola SKPD dengan realisasi dana sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dana Dekonsentrasi (DK)	0	0	0
2.	Dana Tugas Pembantuan (TP)	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

c. Aset tetap pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan selain Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Di samping mengelola aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara juga mengelola aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 0,00 dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 0,00 untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan rincian:

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Aset tetap	BMD Provinsi	BMN
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	0	0
5	Aset tetap Lainnya	0	0
	JUMLAH	0	0



LAMPIRAN-LAMPIRAN